

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan April 2024 mengalami Inflasi sebesar 0,43% (mtm). Inflasi tahunan sebesar 3,12% (yoy) dan Inflasi tahun kalender (ytd) s.d. Januari 2024 sebesar 0,61%. Komoditi penyumbang utama Inflasi bulan April 2024 secara *m-to-m* antara lain: Daging ayam ras, Telur ayam ras, Emas perhiasan, Bawang merah Bawang putih, Cabai rawit, Tarif jalan tol, Nasi dengan lauk, Ikan mujair, dan Pempek. Sedangkan komoditi penyumbang utama inflasi tahunan (*y-on-y*) bulan April 2024 didominasi komoditi makanan antara lain : Beras, Daging ayam ras, Emas perhiasan, Bawang merah, Tarif air minum PDAM, Bawang putih, Sigaret kretek mesin (SKM), Tomat, Cabai merah dan Gula pasir.
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Mei 2024 mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm). Inflasi tahun kalender (ytd) s.d. Mei 2024 sebesar 0,67% dan Inflasi tahunan sebesar 2,98% (yoy). Inflasi Bulanan disebabkan oleh beberapa komoditas utama yaitu Cabai merah, Emas perhiasan, Bawang Merah, Gula Pasir, Pemeliharaan/service, Bahan bakar rumah tangga, Jeruk, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Pisang dan Kopi bubuk.
3. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Juni 2024 mengalami Deflasi sebesar 0,03%. Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Juni 2024 sebesar 0,64% dan Inflasi tahunan sebesar 2,48% (yoy). Komoditi dominan yang menyebabkan terjadinya deflasi bulan Maret 2024 antara lain: Bawang Merah, Tomat, Bawang Putih, Daging ayam ras, Ikan patin, Udang basah, Pepaya, Ikan lele, Beras dan Telur ayam ras.
4. Tingkat Inflasi daerah IHK di Wilayah Sumatera Selatan untuk bulan April, Mei dan Juni 2024, sebagai berikut:

BULAN	TINGKAT INFLASI KOTA PALEMBANG (%)		TINGKAT INFLASI KOTA LUBUK LINGGAU (%)		TINGKAT INFLASI KAB MUARA ENIM (%)		TINGKAT INFLASI KAB OKI (%)		TINGKAT INFLASI PROVINSI SUMATERA SELATAN (%)	
	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)
APRIL	0,38	2,97	0,36	2,45	0,81	3,70	0,42	3,54	0,43	3,12
MAY	0,10	2,81	0,14	2,51	0,29	3,18	0,11	2,81	0,06	2,98
JUNI	-0,07	2,64	-0,10	2,16	-0,02	2,17	0,19	2,27	-0,03	2,48

Selama Triwulan II, tingkat inflasi di keempat kota IHK terkendali dengan baik dan sesuai dengan target capaian $2,5\% \pm 1\%$. Hanya pada bulan April 2024 tingkat inflasi Kabupaten Muara Enim berada di atas target capaian yaitu 3,70% (yoy).

Meskipun di beberapa komoditi cenderung mengalami kenaikan harga yaitu Beras, Daging Ayam Ras, Bawang merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Tomat dan Gula Pasir serta Sigaret Kretek Mesin (SKM) namun kenaikan tersebut tidak berdampak terlalu signifikan terhadap inflasi, bahkan terjadi penurunan harga di beberapa komoditas yang mengakibatkan deflasi pada bulan Juni 2024, Periode panen komoditas hortikultura di triwulan II salah satu faktor pendorong menurunnya tekanan inflasi. sedangkan Emas perhiasan masih andil tertinggi/ terhadap sumbangan inflasi bertepatan dengan momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445H.

Untuk kedepannya kemungkinan tetap akan terjadi kenaikan harga di beberapa komoditi khususnya *volitale food* dikarenakan pengaruh dari cuaca kering dan ekstrim.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan Harga yang disumbang oleh beras pada triwulan II salah satunya masih dipengaruhi oleh kenaikan HET dan relaksasi harga beras dari pemerintah pusat melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Harga Eceran Beras, dimana pada awalnya penetapan HET beras premium untuk pulau Jawa, Lampung, dan Sumsel Rp 12.800,-/kg kemudian mengalami perubahan menjadi Rp.13.900,-/kg. Penyebab harga beras masih cenderung naik diantaranya dipengaruhi oleh perubahan cuaca dari *El Nino* ke *La Nina* yang ekstrim dimana telah masuk musim hujan tetapi suhu panas yang ekstrim. Harga beras premium pada awal bulan Januari 2023 Triwulan I rata - rata Rp 12.500,-/kg dan Triwulan II di bulan Juni rata - rata Rp 13.500,-/kg, dan kemungkinan kenaikan harga akan terus terjadi sampai mendekati nilai maksimal HET beras Rp. 13.900/kg dan setelah terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional No.6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 3 Juni 2024 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras untuk beras premium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan yaitu 14.900/kg maka harga beras dipasaran pun menyesuaikan terhadap harga tersebut dan hal ini perlu mendapat perhatian dikarenakan adanya reaksi dari pasar menyesuaikan HET terbaru yang artinya harga beras mengalami kenaikan.

Selanjutnya peningkatan permintaan kebutuhan pangan lain seperti Bawang merah, Bawang putih, Cabai merah, cabe rawit, serta Tomat dan Gula menjelang hari HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445H yang jatuh di bulan April (Idul Fitri 1445H) dan pada bulan Juni (Idul Adha 1445H), menyebabkan harga belum kembali stabil. Sedangkan sebagian kecil inflasi terjadi karena kenaikan harga emas yang diakibatkan banyaknya permintaan terhadap emas yang menjadi budaya/kebiasaan masyarakat di Sumatera Selatan dalam menyambut hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 1445 Hijriah selain itu kenaikan emas dipicu oleh melemahnya dollar AS.

Angkutan udara dan angkutan antar kota juga mengalami peningkatan dikarenakan banyak Masyarakat yang berlibur dan pulang kampung untuk menyambut hari raya. Hal ini pada akhirnya berpengaruh pada tingkat inflasi di Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2024

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan pengendalian inflasi di daerah melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif), yang telah dilaksanakan pada Triwulan II yaitu:

1. Ketersediaan Pasokan, melalui:

1. Optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School and Go to Office, pelaksanaan dilakukan di sekolah-sekolah SMA/SMK/MAN yang tersebar di 17 kabupaten/kota, dan Forkopimda,

BUMD/BUMN/Perbankan serta instansi vertical.

2. Pelaksanaan sidak ketersediaan beras (sembako) oleh Satgas Pangan Polda, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Pemkot Palembang serta Dinas perdagangan Provinsi Sumsel. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (hari Raya idul Fitri dan idul Adha 1445H). Sidak pasar km 5 tanggal 2 april 2024 (sidak pasokan ke distributor pasar, pasar tradisional dan ritel).
3. Pengembangan Lumbung pangan (food estate) melalui peningkatan produksi pangan/hortikultura seperti pada komoditi Padi, Jagung, kedelai, Bawang Merah, dan aneka cabai (cabe besar dan cabe rawit).
4. Optimalisasi Pembiayaan pertanian, untuk penguatan kelembagaan (penyuluh) dan Petani.
5. Pembelian beras lokal oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap bulannya di tahun 2024, bekerjasama dengan Kantor perum Bulog Wilayah Sumsel Babel.

2. Keterjangkauan Harga melalui:

2. TPID Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pasar Murah antisipasi kenaikan harga sembako menjelang hari raya Idul Fitri 2024 pada tanggal 2 April 2024 bertempat di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, bekerjasama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, BUMD, Perum Bulog dan OPD Provinsi terkait, dengan menyediakan paket sembako dan beras SPHP; Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di 17 Kabupaten/kota. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah pada tanggal 4 April 2024 bertempat di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan dengan CSR Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD); dan Operasi Pasar Murah bersama dengan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka Idul Adha dan Hari jadi Kota Palembang ke-1341.
3. Dinas Pertanian Prov. Sumsel menggelar Pasar Tani sebagai pasar penyeimbang secara rutin setiap rabu dan jumat dan Setiap hari Dinas Ketahanan Pangan membuka Toko Kepo- yang menjual kebutuhan pokok Masyarakat dengan harga dibawah harga pasar, menyiapkan untuk komoditas pangan seperti daging beku, beras dan telur bekerja sama dengan distributor dan Gapoktan.
4. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sampai dengan saat ini telah dilaksanakan GPM sebanyak 16 kali, dan pada triwulan II telah dilaksanakan sebanyak 6 kali, GPM tanggal 16 Mei 2024 menggunakan dana APBD Prov. Sumsel.
5. Monitoring/pemantauan harga dan stok oleh dinas/instansi terkait, seperti dinas perdagangan, dinas ketahanan Pangan dan peternakan serta Tim Satgas Pangan Polda (melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Panel Harga, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan aplikasi lainnya.
6. Pelayanan informasi Pasar (PIP) tananam pangan dan hortikultura di 7 kabupaten/kota terlaksana di 4 kabupaten yaitu Musi Rawas, Banyuasin, Muba dan OKUT.
7. Kegiatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) komoditas pangan, khususnya oleh Perum Bulog melalui beras SPHP, sampai dengan 28 Agustus 2024 realisasi penyaluran Beras SPHP sebanyak 30.690.050kg yang disalurkan ke distributor/BUMN, pengecer di pasar, pengecer diluar pasar, ritel modern dan satgas/pemerintah daerah.

3. Kelancaran distribusi:

1. Mengajak partisipasi BUMN, BUMD, swasta (termasuk BMPD), perbankan, aparat TNI dan Polri serta instansi lainnya dalam pemberian subsidi harga, subsidi angkutan maupun angkutan subsidi operasional lain dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah

serentak se- Sumatera Selatan.

2. Penguatan KAD, Mendampingi KAD antara Pemerintah Kabupaten/kota (Kota Palembang) dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah.
3. Peningkatan sarana dan prasarana jalan, khususnya jalan menuju ke daerah centra produksi, food estate dan strategis.
4. Forum Lalu Lintas yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Rapat Pembahasan persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2024.
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi "Market Place Sibejajo".

4. Komunikasi yang efektif:

Terus dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi ditingkat Pusat, Provinsi Sumsel dan Kab/Kota, antara lain:

1. Pelaksanaan HLM TPID Provinsi Sumatera Selatan bersama TPID Kab/Kota se-Sumatera Selatan pada tanggal 12 Juni 2024, dalam rangkaantisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1445H dan libur anak sekolah serta dampak kekeringan akibat musim kemarau serta dampak la nina, dengan mengundang narasumber dari BMKG kota Palembang.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin oleh TPID Provinsi Sumsel dan Kab/Kota.
3. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, meningkatkan akurasi data surplus dan defisit komoditi pangan.
4. TPID Prov Sumsel secara rutin mengikuti secara zoom meeting bersama, Rakornas Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri setiap minggunya.
5. Pelaksanaan kegiatan **Training Of Trainers** Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) *Go to school* kepada kepala sekolah dan guru penggerak Se- Sumatera Selatan pada tanggal 28 Mei 2024. Kedepannya agenda utamanya adalah **pelaksanaan GSMP goes to school award** yaitu kegiatan pemberian penghargaan kepada sekolah, siswa, guru penggerak dan para penyuluh.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II, beberapa evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan pengendalian Inflasi Daerah, antara lain:

1. Pelaksanaan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dalam rangka menjaga ketersediaan Pangan yang berkelanjutan menjadi salah satu yang diupayakan agar mengubah mainset masyarakat dari pembeli menjadi penjual, ditahun 2024 dilaksanakan dengan selain harapan stock/ketersediaan pangan ada tersedia disekitar masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan agar dapat terkendalnya inflasi maupun penurunan kemiskinan. Dimodifikasi dengan lebih diarahkan atau di fokuskan ke kantor-kantor dan sekolah-sekolah agar terwujud kesadaran perubahan mainset dari pekerja dan siswa. Dana yang digunakan untuk program ini melalui dana CSR, APBD atau lainnya. Karena kegiatan ini melibatkan lintas sektoral maka perlu pelaksanaan koordinasi berkelanjutan dikarenakan keterbatasan. Dalam pelaksanaan GSMP *go to school* melibatkan sekolah-sekolah yang berada di 17 kabupaten/kota yang bersedia dan untuk menarik minat pelajar maka dilaksanakan di tahun 2024 ada GSpm goes to school award.
2. Operasi Pasar maupun Pasar Murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan dan saat ini di tri wulan ke dua adalah khususnya menjaga stabilitas harga pada beras akibat adanya penyesuaian

HET beras dan akibat cuaca yang memasuki masa kering dan La Nina, kemungkinan harga beras akan terus naik. Giat kegiatan operasi pasar murah yang diarahkan oleh Pj. Gubernur Sumsel untuk dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek maka perlu upaya yang berkelanjutan untuk operasi pasar murah selama kondisi pasokan bahan bakar global belum stabil. Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah perlu dilakukan dengan; upaya antara lain;

- Pemerintah Daerah Provinsi perlu terus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/kota, distributor/produsen sembako antara lain Beras, Minyak Goreng, Gula, telur, BUMN, BUMS dan pihak lainnya yang dianggap
- Perlu peran aktif BUMD Pangan atau koperasi dalam hal penyediaan stok bahan pangan pokok agar harga bahan pangan pokok dapat terkendali, BUMD dapat berfungsi sebagai penyerap produksi petani, sekaligus distribusi dan pemasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat arena BUMD adalah milik pemerintah
- Peningkatan koordinasi antar TPID Provinsi dan kabupaten/kota dapat meningkatkan dan menjadi wadah kerjasama dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok baik dari sisi produksi/teknologi produksi terhadap peningkatan kapasitas dan intensitas produksi, dan dari sisi pemasaran/kelancaran distribusi sampai kepada masyarakat (konsumen).
- Pelaksanaan operasi pasar dilaksanakan masih terbatas oleh anggaran dan sumber daya, sehingga belum dapat dirasakan secara merata/menyeluruh oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah/tempat centra produksi komoditi pangan dalam rangka kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan akan komoditi bahan pangan penting antar daerah baik antar daerah dalam provinsi atau luar provinsi yang surplus dan deficit. Hal ini perlu digiatkan agar cepat tersedia untuk kebutuhan pelaksanaan operasi pasar/pasar murah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan Harga Beras di tingkat konsumen masih terus mengalami kenaikan hingga menyesuaikan relaksasi harga komoditi beras di pasaran, dan kemungkinan akan terjadi kenaikan terhadap bahan komoditi pangan lainnya melihat kondisi cuaca kering dan pasar global.

Langkah antisipasi perlu segera dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai tingkat inflasi yang stabil. Saran dan masukan memperhatikan Kondisi tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan II tahun 2024 Beberapa hal yang perlu ditempuh dari arahan Bapak Pj Gubernur Sumatera Selatan, antara lain:

1. melakukan antisipasi ketidakpastian cuaca.
2. Agar pemerintah kabupaten/kota melaksanakan Operasi Pasar Murah disaat kondisi harga menunjukkan kenaikan yang terus menerus terutama menjelang HBKN, dan Langkah-langkah koordinasi kebijakan pengendalian inflasi perlu semakin diperkuat baik dari tingkat provinsi sampai ditingkat daerah kabupaten/kota dalam menjaga stok dan pengawasan perkembangan harga sembako di daerah khususnya komoditi Beras (adanya penyesuaian harga/kenaikan harga dikarenakan adanya perubahan HET Beras). Kemungkinan beras akan mengalami kenaikan bertahap hingga harga mendekati atau sama dengan harga relaksasi beras.
3. Mengintensifkan upaya koordinasi dengan semua pihak terkait dengan melaksanakan rapat koordinasi serta pelaksanaan sidak/monitoring di tingkat produsen hingga pasar,

guna menjamin ketersediaan pasokan, produksi dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok dan bahan pendukung

4. Mendorong daerah untuk merefocusing/pergeseran anggaran dan pemanfaatan BTT untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi..
5. Agar Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai IPH pada komoditi pangan yang menjadi andil inflasi agar bergerak melakukan upaya kebijakan pengendalian inflasi terhadap komoditi tersebut.
6. Memaksimalkan hasil produksi pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri terlebih dahulu.